

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM APLIKASI BUMBLE

Abstrak

Di Indonesia, banyak insiden terjadi sebagai akibat dari aktivitas kencan online ini. Terdapat sejumlah besar kejahatan yang menimpa korban setelah mereka berkenalan melalui media sosial, terutama aplikasi kencan. Pada awalnya, semuanya terlihat positif, komunikasi antara pelaku dan korban berjalan dengan baik, bahkan mencapai tahap melakukan aktivitas seks virtual yang terkadang dilakukan atas dasar sukarela atau karena rayuan dari pelaku. Penegakan hukum sebuah upaya untuk mengedepankan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Secara esensial, penegakan hukum merupakan proses aktualisasi ide-ide tersebut, yang melibatkan usaha untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan bagi pelaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam kehidupan bersama di masyarakat dan negara. menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (4) Perlindungan hukum merujuk pada semua usaha yang bertujuan memberikan perasaan aman kepada korban, yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik dalam bentuk sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui analisis bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan dari para ahli hukum. Penelitian ini fokus pada evaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dapat dijerat dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 , Optimalisasi perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual melibatkan pemberian hak, kewajiban dan pendampingan Hukum, serta perbaikan sistem keamanan dalam Aplikasi Bumble. Optimalisasi ini harus dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan keadilan yang tanpa pandang bulu agar Masyarakat lain tidak mengalami nasib serupa seperti korban di masa yang akan datang.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan hukum

LAW ENFORCEMENT AGAINST ACTS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE BUMBLE APP

Abstract

In Indonesia, many incidents occur as a result of this online dating activity. There is a considerable number of crimes affecting victims who have met through social media, especially dating applications. Initially, everything seems positive, with communication between perpetrators and victims going well, even reaching the stage of engaging in virtual sexual activities, sometimes voluntarily or due to the seduction of the perpetrators. Law enforcement is an effort to prioritize the principles of justice, legal certainty, and social benefit. Essentially, law enforcement is the process of actualizing these ideas, involving efforts to ensure that legal norms function effectively as guidelines for actors in legal interactions and relationships in the collective life of society and the state. According to Law Number 23 of 2004, Article 1 paragraph (4), legal protection refers to all efforts aimed at providing a sense of security to victims, which can be carried out by family members, lawyers, social institutions, the police, the prosecutor's office, the judiciary, or other parties, either temporarily or based on court decisions. In the context of this research, the type of research used is normative legal research. This research approach is conducted through the analysis of literature, including legislation, legal theories, and views from legal experts. This study focuses on evaluating the implementation of positive legal principles that apply. Law enforcement against perpetrators of sexual violence can be charged with Law Number 22 of 2022, Optimizing legal protection for victims of sexual violence involves providing legal rights, obligations and assistance, as well as improving the security system in the Bumble Application. This optimization must be carried out by law enforcement authorities with indiscriminate justice so that other communities do not suffer the same fate as victims in the future.

Keywords: Law Enforcement, Legal Protection, Sexual Violence